

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya serta hasil pengujian terhadap jawaban responden, diperoleh kesimpulan terhadap evaluasi penerapan SPI pada Pemerintah Kota Pariaman sebagai berikut :

- Lingkungan Pengendalian dikategorikan “Cukup”
- Penilaian Resiko dikategorikan “Cukup”
- Kegiatan pengendalian dikategorikan “Baik”
- Informasi dan komunikasi dikategorikan “Baik”
- Pemantauan dikategorikan “Baik”

Secara keseluruhan penerapan kelima unsur SPI dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pariaman sudah baik dengan memperoleh skor rata-rata 68,16%, namun tetap masih diperlukan perbaikan kapasitas yang ada saat ini, dimana masih ada unsur dalam pengendalian yang perlu diperhatikan yaitu penilaian resiko yang memperoleh nilai paling rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemasyarakatan (diseminasi) responden di Kota Pariaman mengenai SPI belum memadai atau masih kurang.

Kondisi daerah Kota Pariaman yang sudah berada pada tahapan diagnostic Assesment/Pemetaan menuju tahap yang ketiga yaitu Norming dari lima tahap penyelenggaraan SPIP menyebabkan belum maksimalnya penerapan unsur-unsur SPI. Keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, merupakan kondisi yang terjadi di Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPIP, penyebab adanya

perbedaan antara kondisi SPIP di daerah dengan kriteria sesuai dengan PP 60 tahun 2008, diantaranya yaitu :

- Kondisi daam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikategorikan baik walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya
- Proses identifikasi resiko yang terstruktur dengan format yang jelas, analisis atas resiko yang sudah teridentifikasi untuk menentukan dampak yang mungkin timbul belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman
- Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah sangat baik dalam pelaksanaannya di Kota Pariaman untuk menunjang pengendalian intern pemerintah
- Pemantauan pengendalian intern baik dalam pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah maupun tinda lanjut hasil rekomendasi sudah berjalan sesuai dengan standar SPIP

## 5.2 Saran

Bagi para peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik ini saran yang dapat diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Penelitian selanjutnya agar dapat mengaitkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan variabel lainnya
2. Penelitian yang dilaksanakan hanya melihat unsur-unsur SPIP secara umum, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mendalami kaitan masing-masing unsur SPIP dengan pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan di Pemerintah Daerah

3. Faktor yang terpenting dalam penerapan SPIP sesuai dengan aturan adalah mengenai soft control yaitu faktor SDM selaku pelaksanaan SPIP. Selain itu komitmen dari pimpinan/pengambil kebijakan juga menjadi faktor penentu dalam penerapan SPIP di pemerintah daerah
4. Faktor komitmen pimpinan adalah merupakan hal yang sangat penting bagi efektifnya penyelenggaraan SPIP di daerah. Mungkin dapat dikaji lebih lanjut hubungan komitmen pimpinan dengan efektivitas penerapan SPIP terhadap opini laporan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah
5. Berhubung sistem pengendalian intern pemerintah ini masih baru untuk itu peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dan kendala yang ditemui selama melakukan penelitian oleh peneliti, yang menyebabkan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu :

1. Keterbatasan yang ada dalam penelitian, yang disebabkan oleh kecilnya jumlah data dan responden yang dijadikan sampel penelitian
2. Penelitian dilakukan pada rentang waktu yang relatif belum terlalu lama sejak PP 60 Tahun 2008 dikeluarkan, sehingga hasilnya juga belum memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Diharapkan penelitian pada masa yang akan datang, dapat dilakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama, sehingga hasil penelitiannya dapat lebih menunjukkan kondisi SPI yang sebenarnya di pemerintah daerah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3. Keterbatasan akan informasi yang didapatkan dalam penelitian, baik itu dari bahan bacaan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang masih sedikit, maupun dari informasi intern pemerintah daerah yang diteliti itu sendiri

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Dari keseluruhan hasil penelitian mengimplikasikan bahwa penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman tidak secara langsung mempengaruhi opini yang diperoleh pada tahun 2011, walaupun secara teoritis opini atas laporan keuangan dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern. Hal ini dikarenakan pelaksanaan SPIP baru berjalan 5 tahun sejak PP No. 60 dikeluarkan, sehingga masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam penerapan SPIP oleh pemerintah daerah.

Faktor yang terpenting dalam penerapan SPIP sesuai dengan aturan adalah mengenai Self Control yaitu faktor SDM selaku pelaksana SPIP. Selain itu komitmen dari pimpinan/pengambil kebijakan juga menjadi faktor penentu dalam penerapan SPIP di pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota pariaman serta wawancara yang dilakukan, beberapa hal yang dapat direkomendasikan oleh peneliti untuk perbaikan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Pariaman, sebagai berikut

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan kontrol dalam penerapan SPI ini. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah SDM yang kompeten terutama dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, memiliki integritas serta mentaati

nilai etika yang mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya. Kemudian tidak hanya itu pembinaan berkesinambungan kepada SDM yang tersedia lebih aplikatif pada seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan disini tidak hanya sekedar tahu dari sosialisasi yang diikuti tetapi sumberdaya manusia yang menguasai tentang sistem pengendalian intern pemerintah ini minimal pada setiap SKPD mempunyai satu orang pejabat yang benar-benar menguasai dan memegang wewenang terhadap sistem pengendalian intern di unit kerjanya

## 2. Komitmen dan keteladanan pimpinan

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPI, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

Lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah-laku dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin.

### 3. Ketersediaan infrastuktur

Keberadaan infrastuktur mencakup antara lain, pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPI lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPI.

Pemerintah Kota Pariaman perlu membenahan pengelolaan aset daerah, dengan cara penyusunan petunjuk teknis tentang penatasahaan aset serta perlu menyusun peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dan meyusun peraturan daerah tentang sistem serta prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan infrastuktur harus didukung oleh implementasi dari infrastuktur SPI tersebut.

### 4. Teknologi

Keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota pariaman juga harus didukung oleh ketersediaan teknologi, baik itu sistem informasi maupun akses dan pengelolaan terhadap aset Negara

